



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN**

Jl. Raya Parigi No. __ Tlp/Fax (0265)
2641089 Kode Pos 46393





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penentuan program dan kegiatan pada tahun 2026. Didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021–2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Parigi, Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680817 199301 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	11
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	11
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	35
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	37
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	37
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	63
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	63
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD	65
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V PENUTUP.....	102



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



Maka dari itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
25. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



- Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pangandaran;



45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026; dan
48. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 900.1.1.2/035/SETWAN/2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan;
2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan;
3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas–tugas kepada Bupati;
4. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun; dan
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat DPRD;
2. Memberikan Kontribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan;
3. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2026; dan
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perubahan Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta



penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan
RKA Perangkat Daerah pada tahun 2026.

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Sekretariat DPRD tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran 2021 - 2026 adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan dewan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 secara detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :



Tabel 2.1.1.
Realisasi Indikator Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD	72,50	70,10	96,69%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	2,86-2,95	3,07-3,53	120%

Tabel 2.1.2
Target Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LHE AKIP Sekretariat DPRD	72.50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.510.696.301,00	31.843.919.694,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	2,86-2,95	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	10.691.904.528,00	8.858.199.028,00



Tabel 2.1.3
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
SEKRETARIAT DPRD		40.702.118.722,00	34.618.832.945,00	85,05
PROGRAM PENUNJANG URUSAN KABUPATEN/KOTA		31.843.919.694,00	28.827.508.364,00	90,53
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.870.000,00	44.369.500,00	79,42
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	330.000,00	330.000,00	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	330.000,00	0,00	0
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	420.000,00	419.700,00	99,93
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	420.000,00	0,00	0
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	720.000,00	0,00	0
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	411.000,00	400.500,00	97,45
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.600.235.374,00	2.951.590.135,00	81,98
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.870.000,00	44.200.000,00	79,11
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.620.000,00	1.611.000,00	99,44
11.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	540.000,00	0,00	0
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	420.000,00	0,00	0
13.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	870.000,00	0,00	0
14.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	195.000,00	0,00	0
15.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.203.000,00	0,00	0
16.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.590.000,00	0,00	0
17.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.170.000,00	450.000,00	38,46
18.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.600.000,00	44.200.000,00	79,50
19.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.050.000,00	23.850.000,00	21,67



20.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.270.000,00	12.600.000,00	68,97
21.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.525.000,00	17.075.000,00	87,45
22.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222.010.000,00	37.025.000,00	16,68
23.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.797.940,00	70.331.000,00	71,91
24.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.390.303,00	196.786.575,00	71,98
25.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.014.360,00	43.908.000,00	91,45
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.916.982,00	239.062.500,00	98,82
26.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186.973.230,00	186.953.000,00	99,99
27.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.887.302,00	57.287.500,00	76,50
28.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	533.472.000,00	533.350.000,00	99,98
29.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.278.000,00	351.276.200,00	69,38
30.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.000.000,00	54.600.000,00	79,13
31.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.067.542,00	2.600.000,00	1,28
33.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	100
34.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	9.546.200,00	63,64
35.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	766.800.000,00	70.617.216,00	92,09
36.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.129.880.540,00	2.316.412.000,00	74,01
37.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.990.000,00	294.136.947,00	99,71
38.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.070.000,00	347.681.182,00	99,60
39.	Pemeliharaan Mebel	11.250.000,00	7.000.000,00	62,22
40.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.500.000,00	101.592.164,00	73,35
41.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	32.400.000,00	0,00	0
42.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.414.000,00	145.714.000,00	85,01
43.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.010.000,00	145.570.200,00	99,02



44.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.222.237.605,00	18.966.137.894,00	98,67
45.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	330.145.396,00	197.650.000,00	59,87
46.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.000.000,00	0,00	0
47.	Fasilitasi Fraksi DPRD	39.800.000,00	35.900.000,00	90,20
48.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	636.475.120,00	559.720.000,00	87,94
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		8.858.199.028,00	5.791.324.581,00	62,38
49.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	169.078.348,00	65.425.000,00	38,70
50.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	672.211.000,00	470.244.500,00	69,95
51.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	9.392.000,00	0,00	0
52.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	760.279.900,00	597.528.000,00	78,59
53.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	173.088.000,00	105.820.000,00	61,14
54.	Pembahasan KUA dan PPAS	228.989.400,00	220.956.000,00	96,49
55.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0,00	0,00	0
56.	Pembahasan APBD	247.489.400,00	143.199.000,00	57,86
57.	Pembahasan APBD Perubahan	0,00	0,00	0
58.	Pembahasan Laporan Semester	2.300.000,00	0,00	0
59.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	176.899.400,00	174.579.000,00	98,69
60.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	35.436.000,00	8.610.000,00	24,30
61.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	35.436.000,00	9.410.000,00	26,55
62.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	35.436.000,00	8.610.000,00	24,30
63.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	35.436.000,00	11.757.000,00	33,18
64.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	192.587.400,00	164.360.000,00	85,34
65.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	236.952.400,00	195.937.000,00	82,69
66.	Orientasi DPRD	490.211.580,00	416.143.826,00	84,89
67.	Pendalaman Tugas DPRD	1.057.055.000,00	783.669.469,00	74,14
68.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0,00	0,00	0
69.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	402.000.000,00	217.000.000,00	53,98



70.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	299.974.900,00	171.000.000,00	57,00
71.	Penyusunan Program Kerja DPRD	5.245.000,00	0,00	0
72.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	64.924.000,00	0,00	0
73.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	7.000.000,00	3.950.000,00	56,43
74.	Pelaksanaan Reses	620.317.000,00	590.755.000,00	95,23
75.	Penyusunan Kode Etik DPRD	105.642.800,00	0,00	0
76.	Pengawasan Kode Etik DPRD	105.642.800,00	64.754.000,00	61,30
77.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	639.000.000,00	639.000.000,00	100
78.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	806.316.700,00	201.787.000,00	25,03
79.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.374.100,00	0,00	0
80.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	126.988.500,00	121.508.000,00	95,68
81.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.073.882.900,00	399.321.786,00	37,18
82.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	38.612.500,00	6.000.000,00	15,54



Tabel 2.1.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024

Kabupaten Pangandaran

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasia Pemerintahan																
Sekretariat DPRD																
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase laporan keuangan dengan baik, peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan dan evaluasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	100	184.760.684.029	53,72	55.463555.292	95	29.709.343.789	90,91	28.827.508.364	95%	29.984.234.168,00	95,69	97,03	72,32	45,62
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	45	423.647.863	19	74.943.140	9	72.088.500	7	45.519.700	9 Dokumen	3.818.400,00	77,78	63,14	57,78	28,43



1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	336.449.582	8	67.500	3	54.900.000	3	44.369.500		3 Dokumen	270.000,00	100,00	80,82	33	26,18
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	5.111.005	2	1.861.500	1	1.110.000	1	330.000		1 Dokumen	330.000,00	100,00	29,73	60	42,88
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5.111.005	2	3.292.500	1	1.050.000	0	0		1 Dokumen	330.000,00	0,00	0,00	40	14,48
1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	22.488.422	2	1.357.500	1	4.612.500	1	419.700		1 Dokumen	330.000,00	100,00	9,10	60	16,51
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	22.488.422	2	1.357.500	1	4.612.500	0	0		1 Dokumen	330.000,00	0,00	0,00	40	6,04
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	26.888.422	2	191.640	1	4.612.500	1	0		1 Laporan	1.050.000,00	100,00	0,00	27	0,71



1.8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5.111.005	1	0	1	1.191.000	1	400.500	100	1.178.400,00	100,00	33,36	40	7,84
1.9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	285	26.810.397.903	80	6.334.013.070	57	4.352.070.000	56	2.997.401.135	100	3.611.104.850,00	98,25	68,87	47,72	34,81
1.10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25.828.413.000	25	6.263.086.930	25	4.293.960.000	22	2.951.590.135	100	3.611.104.850,00	88,00	68,74	88	31,01
1.11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	90,95	0,00	0,00
1.12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	352.709.672	24	68.839.000	12	48.600.000	12	44.200.000	100	100,00	100,00	24,21	50	0,55
1.13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	50	0,55
1.14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	617.042.417	2	1.795.500	1	6.600.000	1	1.611.000	100	0	100,00	0,00	53	4,23



1.15	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	2.050.503	1	1	1	540.000	1	0	0	0	100,00	0,00	30	0,00
1.16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	62	6.901.508	26	291.640	12	1.500.000	12	0	0	0	90,70 100,00	54,70 0,00	49,77 20	30,29
1.17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	62	6.901.508	26	291.640	12	1.500.000	12	0	0	0	90,70 100,00	54,70 0,00	49,77 20	30,29
1.18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	3.280.804	2	0	2	870.000	2	0	0	0	100,00	0,00	60	37,79
1.19	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	215	459.858.684	68	94.621.210	43	82.354.500	39	44.650.000	2	14.203.000,00	100,00	0,00	30	0,00
1.20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	3.485.854	2	0	2	645.000	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	80.766.916	4	30.521.210	2	17.583.000	2	0	2	14.203.000,00	100,00	12,40	40	3,66



1.22	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	3.280.804	2	0	2	922.500	2	0	0	0	100,00	77,54	25	24,16	
1.23	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	10.252.513	0	0	1	2.574.000	0	0	0	0	100,00	14,81	54,78	27,78	
1.24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	120	12.303.015	36	0	24	3.630.000	24	450.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	349.769.582	24	64.100.000	12	57.000.000	12	44.200.000	0	0	100,00	45,78	25	24,16	
1.26	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	115	3.598.983.016	40	915.373.010	23	611.316.480	23	90.550.000	96	Dokumen	458.803.600,00	100,00	14,81	54,78	27,78
1.28	Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



	Disiplin Pegawai																
1.29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	574.140.701	0	0	1	142.390.880	1	23.850.000		1 Paket	0	100,00	0,00	0,00	0 0,00
1.30	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.31	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	177.857.135	24	32.000.000	12	27.525.600	12	12.600.000		0 Dokumen	0	100,00	45,78	0,00	6 0,00
1.32	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	826.835.626	25	190.387.500	25	125.000.000	0	0		0	0	0,00	0,00	16,67	0 23,03
1.33	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	258	361.410.301	50	23.750.000	50	61.525.000	42	17.075.000		46 Orang	20.575.000,00	84,00	27,75	27,52	21 9,28
1.34	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.080	1.658.739.253	153	669.235.510	180	254.875.000	5	37.025.000		50 Orang	438.228.600,00	2,78	14,53	12,50	0 40,35
1.35	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang	3.900	14.459.239.853	1.368	3.591.208.919	777	1.965.087.083	510	1.733.554.775		294 Dokum	1.403.063.546,00	65,64	88,22	48,15	36,83



	Daerah	terlaksana										en					
1.36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	493.136.135	2	72.045.000	1	91.804.980	1	70.331.000	1 Paket	0	100,00	76,61	66,67	20,96	
1.37	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	2.133.634.703	6	528.836.014	3	250.499.442	3	196.786.575	3 Paket	98.031.000,00	100,00	78,56	66,67	27,11	
1.38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45	332.805.551	4	128.798.310	2	51.910.984	2	43.908.000	2 Paket	0	100,00	84,58	17,78	44,90	
1.39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	1.086.726.432	8	295.595.000	4	179.633.100	4	239.062.500	4 Paket	0	100,00	133,08	66,67	41,76	
1.40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	954.554.932	2	312.466.400	1	183.843.950	1	186.953.000	1 Paket	138.238.160,00	100,00	101,69	33,33	43,40	
1.41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15.065	469.462.411	26	134.861.250	13	74.887.302	13	57.287.500	13 Dokumen	0	100,00	76,50	0,35	31,17	
1.42	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	649.656.990	1	10.915.000	1	206.717.325	0	0	0	0	0,00	0,00	20	1,68	



1.43	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200	1.887.853.730	475	1.213.180.825	240	296.840.000	239	533.350.000		240 Laporan	486.345.000,00	99,58	179,68	53,75	82,17
1.44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.864	6.185.956.710	820	810.811.120	500	576.750.000	163	351.276.200		50 Laporan	680.449.386,00	32,60	60,91	29,26	14,40
1.45	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	265.452.261	24	83.700.000	12	52.200.000	12	54.600.000		0	0	100,00	104,60	25	41,02
1.46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	145	2.399.800.320	16	281.604.000	31	456.970.722	27	82.600.000		1 Unit	80.000.000,00	87,10	18,08	29,66	15,18
1.47	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	511.100.501	0	0	2	97.500.000	0	0		0 Unit	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.48	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13	598.435.101	0	0	2	94.849.810	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.49	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	132	721.384.317	10	122.350.000	26	184.620.810	26	2.600.000		26 Unit	0	100,00	0,00	7,58	16,96



1.50	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10	160.0000.00	4	79.257.000	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,00	49,53
1.52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	408.880.401	2	80.000.000	0	0	1	80.000.000	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	60	19,57
1.53	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	6.350	16.061.881.039	2.136	5.476.671.218	1.476.571.218	1.476.218	1.242	3.032.130.367	1532 Laporan	3.063.614.000,00	97,80	94,63	53,20	52,98
1.54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750	113.213.075	1.933	22.099.500	1150	15.300.000	1.122	9.546.200	1400 Laporan	15.000.000,00	97,57	62,39	43,83	23,94
1.55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	77	113.213.075	20	1.185.715.007	12	583.014.000	12	706.172.167	12 Laporan	671.214.000,00	100,00	121,12	33,77	54,56
1.56	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0



1.57	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	565	13.053.065.710	183	4.268.856.711	108	2.605.900.432	108	2.316.412.000	120 Laporan	2.377.400.000,00	100,00	88,89	41,95	41,67
1.58	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	595	5763794241	244	1.706.496	149	901.888.086	145	1.041.694.493	122 Unit	859.871.728,00	97,32	115,50	55,97	41,67
1.59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	1.665.79.1788	14	545.826.149	7	234.990.000	7	294.136.947	7 Unit	279.020.000,00	100,00	125,17	66,67	44,64
1.60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115	1.766.379.751	0	0	20	312.160.000	14	347.681.182	14 Unit	231.220.000,00	70,00	111,38	54,78	40,26
1.61	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	127.775.125	16	5.400.000	15	22.500.000	12	7.000.000	0	0	80,00	31,11	29,33	4,23
1.62	Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	333	773.042.134	115	117.956.3000	64	93.500.000	60	101.592.164	95 Unit	66.250.000,00	93,75	108,65	43,54	21,50



	Mesin Lainnya	Dipelihara															
1.63	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	135	127.775.125	51	104.426.000	27	25.200.000	24	0	0	0	88,89	0,00	42,22	81,73	
1.64	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	536.379.801	6	307.733.500	3	60.520.000	3	145.714.000	3 Unit	161.981.728,00	100,00	285,39	66,67	76,42	
1.65	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	255.550.25	6	85.070.000	3	51.008.086	3	145.570.200	3 Unit	121.400.000,00	0,00	0,00	80	49,20	
1.66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1	511.100.501	1	36.838.3000	10	102.010.000	0	0	0	0,00	0,00	0	7,21		
1.67	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan tersedia	120	107.424.290.284	40	36.101.964.229	120	17.429.144.986	40	19.163.787.894	120 Orang	19.834.755.044,00	33,33	109,95	66,67	51,45	
1.68	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40	105.068.345.078	40	36.101.964.229	40	80.000.000	40	18.966.137.894	40 Orang/ Bulan	19.340.158.964,00	100,00	111,32	100	43,45	
1.69	Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	195	1.867.064.806	0	0	1	311.602.819	1	197.650.000	1 Paket	414.596.080,00	100,00	63,43	0	10,59	



	dan Atribut DPRD	yang Disediakan															
1.70	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40	488.880.401	0	0	40	80.000.000	0	0		40 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	0	0
1.71	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	120	7.358.790.826	27	886.336.000	84	634.209.000	52	595.620.000		72 Laporan	655.000.000,00	61,90	93,92	18,81	20,14
1.72	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	360	1.168.375.745	3	510.000	72	65.160.000	40	35.900.000		60 Laporan	50.200.000,00	55,56	55,10	0,83	0,04
1.73	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	309	6.190.415.081	24	885.856.000	12	56	12	559.720.000		12 Laporan	604.800.000,00	100,00	98,36	9,71	14,64
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	73	97.08942.834	42,16	13.549.814.684	66	16.781.100.135	40,86	5.791.324.581		70 %	14.191.446.832,00	61,90	34,51	56,86	19,92
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	45	511.100.501	18	138.370.000	9	102.010.200	7	65.425.000		24 Dokumen	1.998.741.358,00	77,78	64,14	57,50	18,08
2.2	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	56	13.251.048.962	20	885.053.050	9	1.900.102.900	6	470.244.500		9 Dokumen	179.559.464,00	66,67	24,75	40	27,07



2.3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	255.550.251	4	5.750.000	2	51.004.900	0	0	9 Dokumen	1.014.593.000,00	0,00	0,00	35,71	6,68
2.4	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	29	4.203.996.409	8	1.063.093.190	4	897.687.970	4	597.528.000	2 Dokumen	18.694.000,00	100,00	66,56	40	2,25
2.5	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	200.000.000	0	0	1	199.999.800	1	105.820.000	4 Dokumen	785.894.894,00	100,00	52,91	60	36,13
2.6	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun	5	1.328.861.303	18	138.370.000	9	102.010.200	7	65.425.0000	0	0	77,78	64,14	0	52,91
2.7	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	35	6.669.861.538	14	1.144.033.810	7	1.330.272.300	3	538.734.000	7 Dokumen	1.232.806.360,00	42,86	40,50	48,57	25,23
2.8	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	1.328861.303	2	266.410.610.	1	265.034.460	1	220.956.000	1 Dokumen	245.781.272,00	100,00	83,37	40	20,05
2.9	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	1.328.861.303	2	248.151.000	1	265.034.460	0	0	1 Dokumen	245.781.272,00	0,00	0,00	40	18,67
2.10	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	1.328.861.303	2	210.697.200	1	265.034.460	1	143.199.000	1 Dokumen	245.781.272,00	100,00	54,03	40	15,86



2.11	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	1.328.861.303	2	174.077.000	1	265.034.460	0	0		1 Dokumen	245.781.272,00	0,00	0,00	40	13,10
2.12	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10	25.555.025	4	0	2	5.100.000	0	0		2 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	40	13,10
2.13	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	1.328.861.303	2	244.698.000	1	265.034.460	1	174.579.000		1 Dokumen	245.781.272,00	100,00	0,00	40	18,41
2.14	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	1540	3.724.075.096	391	362.160.500	308	737.359.400	28	398.684.000		104 Laporan	612.794.734,00	9,09	54,07	27,21	20,43
2.15	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	360	465.257.853	98	38.736.000	72	92.855.000	6	8.610.000		25 Laporan	39.186.000,00	8,33	9,27	27,78	8,64
2.16	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	300	520.535.416	96	52.745.000	60	103.830.000	6	9.410.000		25 Laporan	39.186.000,00	10,00	9,06	32,67	10,42
2.17	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	360	465.257.853	95	28.710.000	72	92.805.000	6	8.610.000		25 Laporan	39.186.000,00	8,33	9,28	26,94	6,48



	Rakyat																
2.18	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	360	465.257.853	97	26.166.000	72	92.830.000	8	11.757.000		25 Laporan	39.186.000,00	11,11	12,67	27,50	5,95
2.19	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	140	383325376	0	0	28	76.475.000	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0
2.20	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 21 oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	465.257.853	2	7.000.000	1	92.854.800	1	164.360.000		1 Dokumen	236.481.272,00	100,00	177,01	60,	36,83
2.21	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	465.257.853	1	0	2	92.854.800	0	0		2 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	10	0
2.22	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	493.925.041	2	208.803.500	1	92.854.800	1	195.937.000		1 Dokumen	215.969.462,00	100,00	177,01	60	81,94
2.23	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas DPRD	225	20.077.674.578	102	3.735.509.722	103	3.538.276.500	100	1.587.813.295		45 Dokumen	2.860.642.750,00	97,09	44,88	89,78	26,51



												en					
2.24	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	40	500.000.000	0	0	40	499.574.000	40	416.143.826		0	0	100,00	83,30	0	83,23
2.25	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	15.437.234.684	10	2.869.449.722	4	2.326.509.100	4	783.669.469		4 Dokumen	2.216.597.850,00	100,00	33,68	66,67	21,24
2.26	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	72	295.519.761	19	43.200.000	12	34.800.000	0	0		12 Dokumen	34.800.000,00	0,00	0,00	75	14,62
2.27	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	613.320.601	0	0	12	60.000.000	0	0		12 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	0	0
2.28	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	30	1.839.961.804	12	483.000.000	6	360.000.000	6	217.000.000		6 Orang	360.000.000,00	100,00	60,28	80	29,67
2.29	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	168	1.345.638.683	64	333.550.000	28	248.226.400	21	171.000.000		28 Dokumen	179.999.900,00	75,00	68,89	52,98	29,10
2.30	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	3.013.910.368	2	6.310.000	1	9.167.000	0	0		1 Dokumen	9.245.000,00	0,00	0,00	40	13,72
2.31	Penyerapan dan Penghimpunan	Jumlah Laporan dan Penghimpunan	140	19.734.198.347	35	3.223.248.090	28	3.093.513.000	3	594.705.000		28 Lapora	1.419.696.000,00	10,71	19,22	27,14	19,35



	Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat yang tersusun									n					
2.32	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	310	3.013.910.368	27	64.004.000	24	297.670.000	0	0	24 Laporan	64.924.000,00	0,00	0,00	8,71	2,12
2.33	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	178.885.175	2	5.850.000	1	35.615.000	1	3.950.000	1 Dokumen	11.000.000,00	100,00	11,09	60	5,48
2.34	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	18	16.541.402.803	6	3.153.394.090	3	2.760.228.000	2	590.755.000	3 Dokumen	1.343.772.000,00	66,67	21,40	38,89	20,10
2.35	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	5	596.649.276	2	78.775.000	1	195.580.440	1	64.754.000	1 Laporan	112.050.388,00	100,00	33,11	60	24,06
2.36	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	95.000.000	0	0	1	100.691.220	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2.37	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	501.649.276	2	78.775.000	1	100.691.220	1	64.754.000	1 Laporan	112.050.388,00	100,00	64,31	40	24,39
2.38	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	165	4.772.756.023	56	1.135.000.000	33	792.000.000	33	639.000.000	33 Dokumen	639.000.000,00	100,00	80,68	53,94	37,17
2.39	Penyusunan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan	198	4.772.756.023	56	1.135.000.000	33	792.000.00	33	639.000.000	33 Dokum	639.000.000,00	100,00	80,68	61,62	26,80



	Komunikasi dan Publikasi	Publikasi yang Disusun									en					
2.40	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi DPRD yang terlaksana	205	23.092.331.854	84	1.778.821.322	41	3.943.293.200	34	728.616.786	47 Dokumen	5.315.715.242,00	82,93	18,48	57,56	10,86
2.41	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96	17.874.097.503	32	916.654.700	16	2.857.691.700	6	201.787.000	12 Dokumen	3.034.482.142,00	37,50	7,06	33,33	5,13
2.42	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	127.775.125	2	8.000.000	1	25.424.100	1	0	1 Laporan	8.374.100,00	100,00	0,00	40	6,26
2.43	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	1.105.618.737	24	138.364.800	12	220.659.900	12	121.508.000	12 Dokumen	246.925.500,00	100,00	55,07	50	22,49
2.44	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	1.197.375.202	26	715.801.822	12	146.152.500	12	399.321.786	6 Dokumen	1.620.847.500,00	100,00	273,22	53,33	80,30
2.45	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	48	2.787.465.287	0	0	12	693.365.000	1	6.000.000	10 Dokumen	405.086.000,00	8,33	0,87	2,8	0,22



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan Fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat ditabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	-	%	68.25	69.25	72.50	76,50	61.60	70.00	70.10	76,50	81,50	-
2.	Indeks Pelayanan Publik	-	%	2.61- 2.65	2.66- 2.75	2.86- 2.95	2,96- 3,05	3,26	4.07	3.53	3.05	3,06- 3,15	-

Berdasarkan tabel 2.2.1 dapat disimpulkan bahwa, perkembangan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan dapat melampaui capaian target kinerja yang ditetapkan.



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang di kehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan;
4. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga; dan
5. Menjelang masa Pemilihan Umum banyak kebijakan yang perlu dikaji dan ditingkatkan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun secara total perencanaan tidak terjadi nilai yang signifikan bahkan masih sama.

Rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lo- kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lo- kas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
SEKRETARIAT DPRD											
					45.133.530.000,00					38.389.726.000,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KAB. PANGANDARAN	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	95%	33.197.265.400,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KAB. PANGANDARAN	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	72%	31.022.676.000,00	



1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	18.307.786,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	1.744.400,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.450.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	249.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.040.604,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	249.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.040.604,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	249.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.578.658,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	249.200,00



			Dokumen DPA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.578.658,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	249.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.578.658,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	249.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.040.604,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	249.200,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	57 Dokumen	4.175.539.048,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	49 Dokumen	3.721.812.540,00	



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	4.169.039.048,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	3.720.565.340,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	1.640.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	249.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.980.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	249.200,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	900.000,00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	249.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	14 Laporan	1.140.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan	249.200,00	



			/Triwulanan/ Semesteran SKPD					/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	840.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	249.200,00	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	31 Dokumen	23.299.123,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	27 Dokumen	18.003.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	884.513,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.858.805,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	18.003.000,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	832.483,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	0,00	



	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.601.510,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	3.121.812,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Dokumen	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	23 Dokumen	445.817.761,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	19 Dokumen	549.994.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	145.684.561,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	84.700.000,00



	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	0,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	36.252.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	50.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20.575.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	13.850.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	243.306.200,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	401.444.000,00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	765 Dokumen	2.126.578.117,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	300 Dokumen	1.749.010.800,00	



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.797.940,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.551.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	273.390.303,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	145.611.300,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	48.014.360,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	49.077.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	241.916.982,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	224.968.300,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	186.973.230,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.352.500,00	



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	74.887.302,00	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	52.550.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	697.320.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	697.740.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	506.278.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	348.160.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00



1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah prasarana baik dan fungsi	Unit yang layak	29 Unit	602.839.928,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	29 Unit	80.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang Disediakan	Unit Dinas atau yang	1 unit	250.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00
	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Disediakan	Paket yang	2 unit	150.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit dan yang	26 unit	122.839.928,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 unit	80.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00



1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1270 Laporan	3.574.262.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	1270 Laporan	3.657.582.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1150 Laporan	15.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	638.690.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.790.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108 Laporan	2.920.572.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108 Laporan	2.991.792.000,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	139 Unit	1.250.211.008,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	139 Unit	823.660.000,00



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	294.990.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	289.730.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	349.070.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	207.630.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	26.015.100,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	14.250.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	131.636.407,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	79.250.000,00	



	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	27 unit	26.015.100,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	27 Unit	14.400.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	171.414.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	106.800.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	147.010.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	111.600.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Kab. Pangandaran	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	104.060.401,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Pangandaran	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Ha	0,00	
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	40 Orang	20.285.410.629,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	81 orang	19.885.627.360,00	



	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	19.887.480.089,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	19.393.505.300,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	317.930.540,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	412.122.060,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	80.000.000,00	
1.10	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	84 Laporan	695.000.000,00	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	52 Laporan	535.241.900,00	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72 Laporan	45.000.000,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	40 Laporan	22.750.000,00	



	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	650.000.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	512.491.900,00	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Pangandaran	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	70 %	11.936.264.600,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Pangandaran	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	100 %	7.367.050.000,00	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	24 Dokumen	1.850.207.100,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	24 Dokumen	1.105.214.900,00	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	190.911.900,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9 Dokumen	107.080.000,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	691.534.200,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	447.078.800,00	



	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	52.030.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	15.294.900,00	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	915.731.000,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	535.761.200,00	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0,00	
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7 Dokumen	1.302.212.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7 Dokumen	803.105.000,00	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	163.584.500,00	



Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	161.084.500,00	
Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	162.184.500,00	
Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	162.184.500,00	
Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	1.900.000,00	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	800.000,00	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	153.267.000,00	



2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	280 Laporan	1.077.927.900,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	23 Laporan	354.102.500,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	94.726.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	16.249.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	105.981.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	16.249.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	72 Laporan	94.726.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	16.249.000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	72 Laporan	94.726.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	16.249.000,00	



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0 Laporan	0,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0 Laporan	0,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	230.860.600,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Laporan	137.109.500,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	196.845.900,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.200.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	260.062.400,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	150.797.000,00
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	45 Dokumen	2.218.466.500,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	46 Dokumen	1.895.954.600,00



	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1.606.651.500,00	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1.398.709.600,00	
	Orientasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Orintasi DPRD	0 Dokumen	0,00	Orientasi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Orintasi DPRD	0 Dokumen	0,00	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	30.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	60.000.000,00	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	360.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	250.000.000,00	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	28 Dokumen	217.590.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	28 Dokumen	184.875.000,00	



	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	4.225.000,00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.370.000,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0 Dokumen	0,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0 Dokumen	0,00	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	28 Laporan	1.487.470.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	8 Laporan	1.506.794.000,00	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	129.848.000,00	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	19.287.000,00	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.000.000,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	140.925.000,00	



	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.346.622.000,00	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.346.582.000,00	
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	1 Laporan	105.816.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	1 Laporan	105.857.000,00	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Penyusunan Kode Etik DPRD yang tersusun	0 Laporan	0,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Penyusunan Kode Etik DPRD yang tersusun	0 Laporan	0,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	105.816.000,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	105.857.000,00	
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	33 Dokumen	639.000.000,00	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	33 Dokumen	639.000.000,00	



	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	33 Dokumen	639.000.000,00	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	33 Dokumen	639.000.000,00	
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	53 Dokumen	3.255.165.100,00	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	32 Dokumen	957.022.000,00	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16 Dokumen	1.425.129.500,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	380.695.000,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	4.374.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	3.531.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	240.323.500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	149.882.000,00	



	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.318.672.600,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	303.637.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	12 Dokumen	266.665.500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	119.277.000,00	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada table T-C.32 berikut ini:

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat
NIHIL					



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, ditetapkan dengan tema RKP Tahun 2026 adalah "*Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas*". Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya saing perekonomian, dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berfokus Pada Penguatan Nilai-Nilai Pancasila, Pelaksanaan Demokrasi yang Berkualitas dan Perlindungan HAM;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Mencakup Penguatan Pertahanan dan Keamanan, serta Pembangunan Kemandirian Bangsa Melalui Berbagai Sektor Seperti Pangan, Energi, dan Ekonomi;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja dengan Membangun Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas, dan Mendorong Kewirausahaan;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berfokus Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sains, Teknologi, dan Kesetaraan Gender;



5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Melalui Hilirisasi dan Pengembangan Industri yang Berkelanjutan;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah yang Berfokus Pada Pembangunan Yang Merata Dari Desa Hingga Kota, Termasuk Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, dengan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi; dan
8. Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan yang Mencakup Upaya Pencegahan dan Penindakan Terhadap Berbagai Tindak Pidana.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah *“Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*, Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2026 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pengurangan Kesenjangan Sosial dan Wilayah;
2. Prioritas 2, yaitu Pembangunan Desa dan Penataan Ruang;
3. Prioritas 3, yaitu Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan;
4. Prioritas 4, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup; dan
5. Prioritas 5, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2026 yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang, pembangunan sosial budaya masyarakat yang tanggap bencana, pengelolaan lingkungan hidup, reformasi birokrasi, serta optimalisasi pembangunan bidang keagamaan dan pendidikan berkarakter. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun



2026 adalah : “Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Digitalisasi Terintegrasi”.

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penataan Belanja Daerah yang Efisien dan Produktif;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan;
- c. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berkelanjutan; dan
- d. Penguatan Ekonomi Lokal dan Pengentasan Kemiskinan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu, “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP SETWAN	72,25
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik SETWAN	2,86-2,95

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2026 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran yang ingin diwujudkan pada 2021-2026 yaitu mewujudkan “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia “.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2026 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 program, 18 kegiatan dan 86 Sub kegiatan, sebagai berikut :



Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	02	SEKRETARIAT DPRD				38.389.726.000,00			39.221.038.100,00			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase peningkatan kompetensi aparatur, Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kab. Pangandaran	83 %	31.022.676.000,00	PAD	86 %	32.410.189.500,00	
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Pangandaran	9 Dokumen	1.744.400,00	PAD	9 Dokumen	1.829.800,00	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	3 Dokumen	249.200,00	PAD	3 Dokumen	261.400,00
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD	1 Dokumen	261.400,00



4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD		1 Dokumen	261.400,00
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD		1 Dokumen	261.400,00
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD		1 Dokumen	261.400,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	249.200,00	PAD		1 Laporan	261.400,00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	1 Laporan	249.200,00	PAD		1 Laporan	261.400,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	Kab. Pangandaran	39 Dokumen	3.721.812.540,00	PAD		39 Dokumen	3.779.645.300,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	22 Orang/Bulan	3.720.812.540,00	PAD		22 Orang/Bulan	3.778.337.700,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	249.200,00	PAD		12 Dokumen	261.600,00



4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	249.200,00	PAD		1 Laporan	261.500,00
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD		1 Dokumen	261.500,00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	249.200,00	PAD		12 Dokumen	261.500,00
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	249.200,00	PAD		1 Dokumen	261.500,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran	19 Dokumen	18.003.000,00	PAD		19 Dokumen	18.966.300,00
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	0,00	PAD		2 Dokumen	0,00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	18.003.000,00	PAD		2 Dokumen	18.966.300,00



4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	2 Laporan	0,00	PAD		2 Laporan	0,00
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	0,00	PAD		1 Laporan	0,00
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	0,00	PAD		12 Dokumen	0,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Pangandaran	19 Dokumen	549.994.000,00	PAD		17 Dokumen	406.400.000,00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pangandaran	1 Paket	84.700.000,00	PAD		1 Paket	86.000.000,00
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	0,00	PAD		12 Dokumen	0,00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	44 Orang	50.000.000,00	PAD		22 Orang	30.000.000,00
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	50 Orang	13.850.000,00	PAD		50 Orang	22.000.000,00



4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	150 Orang	401.444.000,00	PAD		75 Orang	268.400.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kab. Pangandaran	299 Dokumen	1.749.010.800,00	PAD		299 Dokumen	1.772.800.000,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1 Paket	45.551.600,00	PAD		1 Paket	45.300.000,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3 Paket	145.611.300,00	PAD		3 Paket	147.500.000,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran	2 Paket	49.077.100,00	PAD		2 Paket	51.000.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	4 Paket	224.968.300,00	PAD		4 Paket	235.000.000,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1 Paket	185.352.500,00	PAD		1 Paket	190.500.000,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	13 Dokumen	52.550.000,00	PAD		13 Dokumen	63.500.000,00
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pangandaran	0 Paket	0,00			0 Paket	0,00



4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pangandaran	240 Laporan	697.740.000,00	PAD		240 Laporan	680.000.000,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	35 Laporan	348.160.000,00	PAD		35 Laporan	360.000.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	1 Unit	80.000.000,00	PAD		27 Unit	240.498.000,00
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit prasarana yang baik dan layak fungsi	Kab. Pangandaran	0 Unit	0,00	PAD		0 Unit	0,00
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	0 Unit	0,00	PAD		0 Unit	0,00
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangandaran	0 Unit	0,00	PAD		26 Unit	154.498.000,00
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1 Unit	80.000.000,00	PAD		1 Unit	84.000.000,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1270 Laporan	3.657.582.000,00	PAD		1270 Laporan	4.332.700.000,00
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangandaran	1150 Laporan	15.000.000,00	PAD		1150 Laporan	16.500.000,00



4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	12 Laporan	650.790.000,00	PAD		12 Laporan	696.200.000,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran	108 Laporan	2.991.792.000,00	PAD		108 Laporan	3.620.000.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	139 Unit	823.660.000,00	PAD		139 Unit	973.650.000,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kab. Pangandaran	7 Unit	289.730.000,00	PAD		7 Unit	342.000.000,00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran	20 Unit	207.630.000,00	PAD		20 Unit	248.000.000,00
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran	15 Unit	14.250.000,00	PAD		15 Unit	14.800.000,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	64 Unit	79.250.000,00	PAD		64 Unit	125.000.000,00



4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	27 Unit	14.400.000,00	PAD		27 Unit	15.250.000,00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	3 Unit	106.800.000,00	PAD		3 Unit	111.600.000,00
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	3 Unit	111.600.000,00	PAD		3 Unit	117.000.000,00
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Pangandaran	0 Ha	0,00	PAD		0 Ha	0,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	120 orang	19.885.627.360,00	PAD		120 orang	20.347.700.100,00
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Pangandaran	40 Orang/Bulan	19.393.505.300,00	PAD		40 Orang/Bulan	19.827.700.100,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	Kab. Pangandaran	1 Paket	412.122.060,00	PAD		1 Paket	435.000.000,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	40 Orang	80.000.000,00	PAD		40 Orang	85.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Pangandaran	52 Laporan	535.241.900,00	PAD		52 Laporan	536.000.000,00



4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	40 Laporan	22.750.000,00	PAD		40 Laporan	23.900.000,00
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	Kab. Pangandaran	12 Laporan	512.491.900,00	PAD		12 Laporan	512.100.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik	Kab. Pangandaran	73 %	7.367.050.000,00	PAD		76 %	6.900.848.600,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Kab. Pangandaran	24 Dokumen	1.105.214.900,00	PAD		24 Dokumen	1.108.800.000,00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	9 Dokumen	107.080.000,00	PAD		9 Dokumen	108.000.000,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	9 Dokumen	447.078.800,00	PAD		9 Dokumen	453.700.000,00
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	15.294.900,00	PAD		2 Dokumen	15.294.000,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab. Pangandaran	4 Dokumen	535.761.200,00	PAD		4 Dokumen	441.600.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Kab. Pangandaran	7 Dokumen	803.105.000,00	PAD		7 Dokumen	813.340.000,00



4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	163.584.500,00	PAD		1 Dokumen	166.000.000,00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	161.084.500,00	PAD		1 Dokumen	163.000.000,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	162.184.500,00	PAD		1 Dokumen	164.000.000,00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	162.184.500,00	PAD		1 Dokumen	164.000.000,00
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	800.000,00	PAD		2 Dokumen	840.000,00.
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	153.267.000,00	PAD		1 Dokumen	155.500.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Kab. Pangandaran	23 Laporan	354.102.500,00	PAD		23 Laporan	358.860.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	5 Laporan	16.249.000,00	PAD		5 Laporan	16.400.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	5 Laporan	16.249.000,00	PAD		5 Laporan	16.400.000,00



4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	5 Laporan	16.249.000,00	PAD		5 Laporan	16.400.000,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	5 Laporan	16.249.000,00	PAD		5 Laporan	16.400.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	1 Laporan	137.109.500,00	PAD		1 Laporan	139.000.000,00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	1.200.000,00	PAD		2 Dokumen	1.260.000,00
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	150.797.000,00	PAD		1 Dokumen	153.000.000,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	51 Dokumen	1.895.954.600,00	PAD		51 Dokumen	1.512.150.000,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	4 Dokumen	1.398.709.600,00	PAD		4 Dokumen	1.091.000.000,00
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	12 Orang	60.000.000,00	PAD		12 Orang	0,00
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	6 Orang	250.000.000,00	PAD		6 Orang	253.750.000,00



4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	28 Dokumen	184.875.000,00	PAD		28 Dokumen	165.000.000,00
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	2.370.000,00	PAD		1 Dokumen	2.400.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Kab. Pangandaran	8 Laporan	1.506.794.000,00	PAD		8 Laporan	1.380.665.000,00
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	4 Laporan	19.287.000,00	PAD		4 Laporan	19.500.000,00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	140.925.000,00	PAD		1 Dokumen	11.165.000,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	3 Dokumen	1.346.582.000,00	PAD		3 Dokumen	1.350.000.000,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Kab. Pangandaran	1 Laporan	105.857.000,00	PAD		1 Laporan	107.400.000,00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	105.857.000,00	PAD		1 Laporan	107.400.000,00
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	33 Dokumen	639.000.000,00	PAD		33 Dokumen	648.500.000,00
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan dan Komunikasi Publikasi	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	Kab. Pangandaran	33 Dokumen	639.000.000,00	PAD		33 Dokumen	648.500.000,00



4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kab. Pangandaran	32 Dokumen	957.022.000,00	PAD		32 Dokumen	971.133.600,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Kab. Pangandaran	5 Dokumen	380.695.000,00	PAD		5 Dokumen	386.450.000,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	3.531.000,00	PAD		1 Laporan	3.583.600,00
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	149.882.000,00	PAD		12 Dokumen	152.000.000,00
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	303.637.000,00	PAD		12 Dokumen	308.100.000,00
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	119.277.000,00	PAD		2 Dokumen	121.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 10 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 8 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

Berikut secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2026:



Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
SEKRETARIAT DPRD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rekening	Anggaran	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja	
			Indikator	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DPRD	38.389.726.000,00						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	31.022.676.000,00	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				Nilai SAKIP 81,50	83%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.744.400,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu					9 Dokumen
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	249.200,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Renja 2026, Renja Perubahan Tahun 2025 dan Review Renstra	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	3 Dokumen
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	249.200,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen



1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	249.200,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	249.200,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	249.200,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	249.200,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Capaian Kinerja Triwulan IV 2025, Triwulan I, II, III 2026	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Laporan
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249.200,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.721.812.540,00	Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun					39 Dokumen
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.720.565.840,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	22 Orang/ Bulan



2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	249.200,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Dokumen
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	249.200,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Laporan
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	249.200,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	249.200,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Semesteran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Dokumen
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	249.200,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Dokumen
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.003.000,00	Dokumen barang milik daerah yang tersedia dalam kondisi baik					19 Dokumen
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	2 Dokumen



3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.003.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Asuransi Mobil dan Dokumen Asuransi motor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	2 Dokumen
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0,00	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	2 Laporan
3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Laporan
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Rekonsiliasi Aset dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Dokumen
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Laporan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	549.994.000,00	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersusun					19 Dokumen



4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84.700.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Hasil Penilaian SAKIP	Jenis Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Paket
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian/Bulan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Dokumen
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Hasil Penilaian SAKIP	Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	44 Orang
4.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.850.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	50 Orang
4.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	401.444.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	150 Orang
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.749.010.800,00	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik					299 Dokumen



5.1	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Komponen Listrik/Bangunan	45.551.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Paket
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		145.611.300,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Alat Tulis Kantor Paket Penyelenggaraan Acara Paket Perlengkapan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	3 Paket
5.3	Penyediaan Rumah Tangga	Peralatan	49.077.100,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Peralatan Perabot Kantor Paket Peralatan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	2 Paket
5.4	Penyediaan Bahan Kantor	Bahan Logistik	224.968.300,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Bahan Kimia Paket Bahan Isi Tabung Gas Paket Bahan Lainnya Paket Souvenir/Cinderamata	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	4 Paket
5.5	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Barang	185.352.500,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Bahan Cetak Penggandaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Paket
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		52.550.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen MOU Penyediaan Bahan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	13 Dokumen



5.7	Penyediaan Bahan/Material	0,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Penyediaan Bahan/ Material	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Paket
5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	697.740.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	240 Laporan
5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.160.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	35 Laporan
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Penatausahaan Arsip	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Dokumen
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	Unit Barang Milik daerah yang tersedia					1 Unit
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Unit
6.2	Pengadaan Mebel	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan Unit Mebel Yang Tersedia	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Unit



6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit dan Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan Peralatan dan Mesin Yang Tersedia	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Unit
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit dan Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.657.582.000,00	Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia					1270 Laporan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Unit dan Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Materai Paket Pengiriman	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1150 Laporan
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.790.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit dan Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Laporan



7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.991.792.000,00	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Laporan Rapat DPRD/Sekretariat DPRD Laporan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Laporan Jasa Tenaga Kebersihan Laporan Jasa Tenaga Keamanan Laporan Jasa Tenaga Supir	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	108 Laporan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.660.000,00	Unit barang milik daerah yang terpelihara					139 Unit
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.730.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	7 Unit
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.630.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	20 Unit



8.3	Pemeliharaan Mebel	14.250.000,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Mebel yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	15 Unit
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.250.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	64 Unit
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	14.400.000,00	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	27 Unit
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.800.000,00	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	3 Unit
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.600.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	3 Unit
8.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0,00	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Hasil Penilaian SAKIP	Luas Tanah yang Dilakukan Rehabilitasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	0 Ha
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.885.627.360,00	Orang Yang Menerima Layanan Keuangan Yang Tersedia					120 Orang



9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.393.505.300,00	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	40 Orang/Bulan
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	412.122.060,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	1 Paket
9.3	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	80.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	40 Orang
10.	Layanan Administrasi DPRD	535.241.900,00	Laporan Layanan Administrasi Yang Tersedia					52 Laporan
10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	22.750.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD (6 Fraksi X 12 Bulan)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	40 Laporan
10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	512.491.900,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Rapat Paripurna Hari Jadi, 16 Agustus, 3 Kali Rapat Pembukaan Masa Sidang, 3 Kali Rapat Tutup Masa Sidang, 1 Rapat PAW, Dan 3 Kali Rapat Paripurna Reses)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP 81,50	12 Laporan



II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.367.050.000,00	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik				Nilai Indeks Pelayanan Publik 3,06-3,15	73 %
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.105.214.900,00	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Yang Disepakati Bersama					24 Dokumen
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	107.080.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	9 Dokumen
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	447.078.800,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Raperda yang Mendapat Persetujuan Bersama Antara Pemda dan DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	9 Dokumen
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	15.294.900,00	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	2 Dokumen



1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	535.761.200,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	4 Dokumen
1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0,00	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	0 Dokumen
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	803.105.000,00	Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Tersusun					7 Dokumen
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	163.584.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Nota Kesepakatan KUA dan PPAS)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen



2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	161.084.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Nota kesepakatan KUPA PPAS Perubahan)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen
2.3	Pembahasan APBD	162.184.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Raperda APBD)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen
2.4	Pembahasan Perubahan APBD	162.184.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan (Raperda APBD Perubahan)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen
2.5	Pembahasan Laporan Semester	800.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	2 Dokumen



2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	153.267.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Hasil Penilaian Indeks Pelayana n Publik	Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Raperda Pertanggungjawaban APBD)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen	
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	354.102.500,00	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tersusun						23 Dokumen
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16.249.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Hasil Penilaian Indeks Pelayana n Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Rakor Komisi 1)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	5 Laporan	
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16.249.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hasil Penilaian Indeks Pelayana n Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Rakor Komisi 3)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	5 Laporan	



3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16.249.000,00	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor komisi 4)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	5 Laporan
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16.249.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Rakor komisi 2)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	5 Laporan
3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Rakor komisi 3)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	0 Laporan



3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	137.109.500,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Laporan
3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.200.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	2 Laporan
3.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	150.797.000,00	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Laporan
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.895.954.600,00	Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD					51 Dokumen



4.1	Orientasi DPRD	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Orientasi DPRD (Untuk Anggota DPRD Baru Terpilih)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	0 Dokumen
4.2	Pendalaman Tugas DPRD	1.398.709.600,00	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	4 Dokumen
4.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0,00	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	0 Dokumen
4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60.000.000,00	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	12 Orang



4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	250.000.000,00	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Tenaga Ahli Fraksi	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	6 Orang
4.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	184.875.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	28 Dokumen
4.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.370.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.506.794.000,00	Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Tersusun					8 Dokumen



5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	19.287.000,00	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Kunjungan DPRD	Hasil Kerja	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	4 Laporan
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	140.925.000,00	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Dokumen
5.3	Pelaksanaan Reses	1.346.582.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	3 Dokumen
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	105.857.000,00	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Tersusun						1 Laporan



6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	0,00	Jumlah Laporan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	0 Laporan
6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	105.857.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Laporan
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	639.000.000,00	Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Tersusun					33 Dokumen
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	639.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen MOU dan Publikasi Dengan Media Elektronik Dan Media Cetak	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	33 Dokumen
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	957.022.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana					32 Dokumen



8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	380.695.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Hasil dan Tugas	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	5 Dokumen
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	3.531.000,00	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Disusun	Alat dan Tugas yang	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	1 Laporan
8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	149.882.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Musyawarah (Hasil Rapat Musyawarah dan Rapat Koordinasi Badan Musyawarah)	Hasil Badan (Hasil Badan dan Koordinasi)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	12 Dokumen
8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	303.637.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pimpinan Tugas DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Fasilitasi Pimpinan (Rapat Tugas DPRD)	Hasil Tugas DPRD Koordinasi Pimpinan	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	12 Dokumen



8.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	119.277.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Panitia Khusus (Rapat, Perjalanan Dinas, serta laporan terkait panitia khusus)	Dukungan Ketercapaian Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai IPP 3,06-3,15	2 Dokumen
-----	---	----------------	--	---	---	---	---------------------	-----------



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Parigi, Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680817 199301 1 001